

## Optimasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur

Arnoldus primus Nuwa<sup>1</sup>, Maria Imakulata Pongge<sup>2\*</sup> dan Enike Tje Yustin Dima<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira, Kota Kupang , Indonesia

\*e-mail : : mariaimakulatapongge2@gmail.com

---

### ABSTRAK

#### *Artikel Info*

#### **Received :**

27 November 2025

#### **Revised :**

3 December 2025

#### **Accepted :**

5 December 2025

#### Kata Kunci :

Partisipasi Masyarakat,  
Pengelolaan Keuangan Desa,  
Pembangunan Infrastruktur,  
Modal Sosial

#### Keywords :

Community Participation,  
Village Financial  
Management, Infrastructure  
Development, Social Capital

Pembangunan infrastruktur desa membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dari tata kelola yang partisipatif dan akuntabel. Penelitian ini menganalisis bentuk partisipasi masyarakat Desa Takatunga, faktor yang memengaruhinya, serta keterkaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, khususnya penggunaan Dana Desa. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa partisipasi terutama muncul dalam bentuk kontribusi tenaga pada tahap pelaksanaan, sementara keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi masih rendah. Hambatan utama meliputi rendahnya kepercayaan diri, keterbatasan waktu karena aktivitas pertanian, serta kurangnya penyebaran informasi. Meskipun modal sosial seperti gotong royong dan kepercayaan pada tokoh lokal mendorong keikutsertaan warga, pengelolaan keuangan desa masih bersifat top-down sehingga modal sosial belum terintegrasi dalam perencanaan anggaran. Penelitian menegaskan perlunya penguatan forum musyawarah, literasi anggaran, dan transparansi informasi untuk mendorong partisipasi yang lebih substantif dalam pembangunan infrastruktur desa.

---

## *Optimizing Village Financial Management Through Community Participation in Infrastructure Development*

---

### ABSTRACT

Rural infrastructure development requires community involvement as an essential component of participatory and accountable governance. This study analyzes the forms of community participation in Takatunga Village, the factors influencing it, and its relationship with village financial management, particularly the use of Village Funds for infrastructure development. Using a qualitative descriptive approach through interviews, observations, and document analysis, the findings show that participation primarily takes the form of labor contributions during the implementation stage, while involvement in planning and evaluation remains limited. Key barriers include low self-confidence, time constraints due to agricultural activities, and insufficient information dissemination. Although social capital—such as mutual cooperation and trust in local leaders—encourages community engagement,

*financial management remains top-down, preventing social capital from being integrated into budgeting processes. The study highlights the need to strengthen deliberation forums, improve community budget literacy, and enhance transparency to promote more substantive participation in village infrastructure development.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan (Rahmasari, 2020). Secara teoretis, perspektif ekonomi pedesaan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas pertanian, efisiensi mobilitas tenaga kerja, serta diversifikasi ekonomi lokal (Arsyad, 2010). Infrastruktur yang memadai memperkuat konektivitas, menurunkan biaya transaksi, dan membuka akses pasar bagi komoditas pedesaan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah secara bertahap. Dalam kerangka tersebut, Dana Desa berfungsi sebagai instrumen fiskal strategis untuk mendukung penyediaan infrastruktur dasar seperti sanitasi air, jalan tani, dan fasilitas pendidikan di tingkat lokal. Namun berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan keuangan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan (Anisa et al., 2024; Ompusunggu & Munthe, 2020). Di sisi lain, literatur partisipasi masyarakat menekankan bahwa pelibatan warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa meningkatkan rasa memiliki, akuntabilitas, dan keberlanjutan Pembangunan (Sulistyowati & Nataliawati, 2022). Dengan demikian, integrasi antara pengelolaan keuangan desa, dinamika sosial lokal, dan prinsip pembangunan daerah menjadi isu penting dalam optimalisasi pembangunan infrastruktur pedesaan .

Desa Takatunga di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur merupakan contoh nyata desa agraris yang memiliki potensi sumber daya manusia dan alam, namun menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur. Desa ini berada di kawasan perbukitan dengan kemiringan lahan tinggi serta aksesibilitas terbatas, sementara sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Dalam ekonomi pedesaan, kondisi geografis semacam ini sering memunculkan *high-cost economy* yang mengurangi efisiensi distribusi hasil pertanian dan membatasi peluang peningkatan pendapatan rumah tangga. Data kependudukan menunjukkan basis tenaga kerja yang cukup besar yang secara teoritis dapat mendukung pembangunan berbasis partisipasi..

**Tabel 1.** Data Penduduk Desa Takatunga

No.	Jenis Kelamin	Usia		
		Produktif	Tidak Produktif	
1	Laki-laki	507 Jiwa	406 Jiwa	101 Jiwa
2	Perempuan	582 Jiwa	315 Jiwa	267 Jiwa

Sumber : Pemerintah Desa Takatunga, Tahun 2025

Komposisi ini mencerminkan bahwa lebih dari separuh penduduk berada pada usia produktif sehingga memiliki kapasitas tenaga kerja yang dapat dimobilisasi dalam pembangunan fisik maupun perencanaan partisipatif. Namun, temuan lapangan mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur—baik tenaga, ide, maupun pengawasan—masih belum optimal. Beberapa program, seperti sanitasi air, pemeliharaan jalan tani, dan fasilitas pendidikan, menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran, keterbatasan waktu, serta minimnya inisiatif warga. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana potensi demografis dan fiskal desa dapat dioptimalkan melalui mekanisme partisipasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Dari sisi keuangan publik desa, Desa Takatunga menerima Dana Desa dan komponen tambahan yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai jumlah dan arah penggunaan anggaran.

**Tabel 1.** Alokasi Dana Desa Takatunga Tahun 2025

No.	Komponen	Jumlah
1	Dana desa	473.109.000
2	Komponen tambahan	113.830.000
3	Pekerjaan Umum	213.112.024
4	Pendidikan (PAUD dan Sarana Belajar)	51.530.000

Sumber : Pemerintah Desa Takatunga, Tahun 2025

Secara normatif, Dana Desa diprioritaskan untuk infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, sanitasi, peningkatan jalan tani, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan. Namun tanpa tata kelola keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, alokasi tersebut berisiko tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat atau kurang efisien dalam implementasi (Ikhyannuddin et al., 2025; Tamsil et al., 2025). Dalam teori pembangunan daerah, efektivitas belanja pembangunan sangat terkait dengan *local institutional capacity* di mana kapasitas musyawarah, literasi fiskal masyarakat, dan kepemimpinan lokal menentukan kualitas keputusan pembangunan. Masalah utama yang muncul adalah bagaimana menghubungkan mekanisme pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan—dengan pola partisipasi masyarakat sehingga pemanfaatan Dana Desa untuk infrastruktur benar-benar optimal (Rachmawati & Indudewi, 2024). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, penyusunan RPJMDes dan RKPDes, serta pelibatan warga dalam pelaksanaan dan pemantauan proyek dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi dan mendorong pengambilan keputusan berbasis kebutuhan (Hasanati et al., 2023).

Namun dalam praktiknya, partisipasi sering berhenti sebagai formalitas dan belum terhubung secara struktural dengan optimasi pengelolaan keuangan desa. Studi sebelumnya lebih banyak menyoroti dimensi sosial partisipasi. Ramandey & Binur, (2020) menemukan bahwa partisipasi warga cenderung fungsional dan dimobilisasi aparat desa, dengan kontribusi ide yang terbatas. Asdi et al., (2023) menunjukkan bahwa swadaya tenaga belum terintegrasi dalam mekanisme perencanaan dan akuntabilitas keuangan. Di sisi lain, literatur pengelolaan keuangan desa menekankan perlunya penguatan peran masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Fujiyanti et al., (2023) menegaskan bahwa partisipasi memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sementara Taurista & Choiriyah, (2024) menekankan pengaruh pendidikan, akses informasi, dan kepemimpinan lokal.

Namun kajian tersebut umumnya masih memisahkan partisipasi dan keuangan desa sebagai dua domain yang berjalan paralel.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada Desa Takatunga untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat—baik tenaga, pikiran, maupun kehadiran dalam forum musyawarah—berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan infrastruktur. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan dua ranah yang sering dikaji terpisah: partisipasi masyarakat dan manajemen keuangan desa, seraya menempatkannya dalam konteks teori ekonomi pedesaan dan pembangunan daerah. Studi ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk partisipasi, tetapi juga menganalisis implikasi strukturalnya terhadap pemanfaatan Dana Desa. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada konteks desa pegunungan di Kabupaten Ngada yang relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian empiris mengenai tata kelola keuangan desa dan pembangunan partisipatif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berorientasi pada upaya memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berorientasi pada upaya memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi aktor yang terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur desa.

### Informan Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek secara sengaja dengan mempertimbangkan pengetahuan, posisi sosial, dan keterlibatan mereka dalam pembangunan desa. Informan terdiri dari:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa, sebagai pemegang otoritas dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Desa.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mewakili fungsi legislatif desa dan memiliki peran dalam pengawasan pembangunan.
3. Tokoh masyarakat dan tokoh adat, yang memiliki pengaruh sosial kuat dan sering menjadi rujukan warga dalam pengambilan keputusan.
4. Kelompok perempuan dan pemuda, sebagai representasi partisipasi kelompok sosial yang sering terpinggirkan dalam proses pembangunan.
5. Warga umum, khususnya mereka yang terlibat dalam gotong royong atau menerima manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur.

Proses pemilihan informan berlanjut hingga mencapai *saturation point*, yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh tidak lagi memberikan temuan baru (Naeem et al., 2024). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali pengalaman informan.. Wawancara direkam, ditranskripsi, dan kemudian dianalisis secara tematik. Observasi dilakukan terhadap kondisi infrastruktur, proses gotong royong, serta interaksi antara pemerintah desa dan warga. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Profil Desa, APBDes, RPJMDes, RKPDes, notulen musyawarah, SK panitia pembangunan, foto kegiatan, serta laporan pembangunan. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk menguatkan data primer dan memberikan konteks struktural mengenai arah kebijakan desa.

### **Definisi Operasional Konsep**

Definisi operasional konsep dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. Partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan warga desa, baik secara aktif maupun pasif, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Keterlibatan ini mencakup kontribusi tenaga dalam kegiatan fisik, pemberian ide dan usulan dalam forum musyawarah, serta kehadiran dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan hasil pembangunan. Faktor pendorong dimaknai sebagai kondisi sosial, budaya, ekonomi, maupun struktural yang meningkatkan peluang dan kecenderungan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Contoh faktor pendorong antara lain motivasi gotong royong, adanya dukungan tokoh masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah desa, serta persepsi adanya manfaat langsung dari program pembangunan bagi kehidupan sehari-hari. Sementara itu, faktor penghambat merujuk pada berbagai kendala yang membatasi atau melemahkan partisipasi masyarakat. Kendala tersebut dapat berupa rendahnya kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan, keterbatasan waktu akibat pekerjaan utama seperti aktivitas pertanian, komunikasi pemerintah desa yang kurang optimal sehingga informasi tidak merata, serta keterbatasan kapasitas pengetahuan dan kepercayaan diri masyarakat untuk berkontribusi secara substantif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data mengikuti model Miles, Huberman & Saldaña (2014) meliputi:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah data yang dianggap penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menyusunnya secara sistematis sesuai fokus penelitian. Data yang telah dipilih selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tiga tema utama, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, berbagai faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi tingkat partisipasi tersebut, serta peran pemerintah desa dalam memfasilitasi, mengarahkan, dan mengelola proses partisipasi.

#### 2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk narasi, ringkasan kategori, kutipan wawancara, dan tabel informan untuk memudahkan interpretasi dan melihat pola partisipasi masyarakat secara jelas.

#### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diperoleh melalui penafsiran pola data, triangulasi antara sumber data, serta pengecekan kebenaran informasi dengan informan kunci. Teknik verifikasi dilakukan secara kontinu selama proses penelitian berlangsung..

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perencanaan pembangunan di Desa Takatunga berlangsung melalui penyusunan RPJMDes dan RKPDes sebagai pedoman jangka panjang dan tahunan yang mengarahkan program pembangunan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Kepala Desa, kedua dokumen ini tidak hanya menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam penyusunan anggaran desa, khususnya dalam menentukan alokasi Dana Desa untuk sektor infrastruktur. Melalui RPJMDes dan RKPDes, pemerintah desa memastikan bahwa penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan berjalan terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal.

Dokumen perencanaan ini tidak hanya menjadi dasar penyusunan anggaran dan pelaksanaan program, tetapi juga berfungsi menumbuhkan rasa memiliki, tanggung jawab bersama, serta memperkuat partisipasi dan semangat gotong royong. Melalui mekanisme musyawarah desa, pemerintah telah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat sejak tahap perencanaan. Dalam wawancara, Bapak Nikolaus Nago selaku Kepala Desa Takatunga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Namun ia juga mengakui bahwa partisipasi yang muncul belum sepenuhnya berangkat dari inisiatif mandiri. Hal ini sejalan dengan penjelasan Bapak Firmus Marianus Watu selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa banyak warga “*menunggu undangan atau ajakan dari aparat desa*” sebelum terlibat dalam kegiatan pembangunan. Pola ini memberi indikasi awal bahwa partisipasi masyarakat lebih bersifat responsif terhadap ajakan pemerintah, bukan partisipasi proaktif yang tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab bersama.

## **Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur**

### **1. Partisipasi dalam Bentuk Uang dan Dukungan Material**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk uang hampir tidak tampak secara nyata. Dalam wawancara, Bapak Nikolaus Nago selaku Kepala Desa menyatakan: “*Untuk keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi uang sebenarnya bisa dibilang belum ada. Masyarakat belum pernah menyumbang secara langsung dalam bentuk uang untuk pembangunan jalan atau sanitasi, karena mereka beranggapan semua sudah ditanggung oleh dana desa yang dianggarkan.*” Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua RT To’o Jogho yang menjelaskan bahwa selama ini masyarakat tidak diminta untuk memberikan iuran uang karena seluruh anggaran pembangunan telah tercakup dalam Dana Desa.

Meskipun demikian, beberapa warga menyampaikan bentuk kontribusi lain yang bersifat non-uang. Ibu Martina Watu menuturkan bahwa dalam beberapa kegiatan gotong royong, masyarakat turut menyediakan konsumsi bagi para pekerja. Ada pula warga yang meminjamkan alat kerja atau membantu menyiapkan bahan bangunan sederhana. Dukungan seperti ini menunjukkan adanya kepedulian, tetapi secara nominal tidak tercatat dalam dokumen anggaran sehingga sering kali tidak diakui sebagai partisipasi material.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Irawan, (2023) menunjukkan bahwa kebijakan alokasi Dana Desa yang kuat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, namun di banyak desa warga cenderung memandang pembangunan infrastruktur sebagai tanggung jawab penuh pemerintah desa, sehingga partisipasi finansial masyarakat dianggap tidak lagi mendesak. Di sisi lain, literatur tentang keuangan desa menekankan bahwa kontribusi lokal, meskipun kecil, dapat memperkuat rasa memiliki dan akuntabilitas sosial terhadap hasil pembangunan. Dalam konteks Desa Takatunga, ketiadaan partisipasi uang mencerminkan keterbatasan ekonomi sekaligus persepsi bahwa Dana Desa adalah sumber pendanaan utama yang “menggantikan” kewajiban kontribusi materi warga.

### **2. Partisipasi Tenaga dan Keikutsertaan dalam Pelaksanaan**

Partisipasi tenaga merupakan bentuk keterlibatan yang paling menonjol, gotong royong masih menjadi praktik sosial yang hidup di Desa Takatunga, terutama dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan tani, penggalian dan pemasangan pipa air bersih, serta kegiatan kebersihan lingkungan. Bapak Firmus Marianus Watu, selaku kepala

urusan perencanaan menyatakan: *“Partisipasi masyarakat Desa Takatunga dalam pembangunan infrastruktur tergolong cukup baik, tercermin dari keterlibatan warga terampil dan kesediaan ikut gotong royong, sehingga tetap menunjukkan sikap positif dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan desa secara kolektif dalam praktik”*.

Namun demikian, partisipasi tenaga tersebut tidak merata. Bapak Gregorius Gosa sebagai masyarakat desa Takatunga menggambarkan dilema antara mengikuti kegiatan pembangunan desa atau memilih pekerjaan harian yang memberikan upah lebih tinggi di luar desa. *“Pekerja pembangunan di Desa Takatunga seluruhnya warga lokal yang diberdayakan sesuai keahlian dan tetap menerima upah meski lebih rendah, sementara sebagian lain memilih pekerjaan luar desa yang lebih menguntungkan. Bagi pekerja yang terlibat, kontribusi ini dipandang sebagai pemanfaatan keahlian sekaligus tanggung jawab terhadap kesejahteraan desa dalam jangka panjang bagi komunitas”*. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tenaga sangat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan siklus kerja agraris.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga dipengaruhi oleh kualitas koordinasi pemerintah desa. Menurut Kepala Desa, *“keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sangat penting, tetapi kami masih mendapati ada warga yang memilih diam di rumah atau mencari pekerjaan lain ketika ada kegiatan desa.”* Beberapa warga mengaitkan hal ini dengan kurangnya komunikasi awal tentang jadwal kegiatan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian, partisipasi tenaga yang cukup baik belum dapat dikatakan stabil, karena sensitif terhadap faktor ekonomi, informasi, dan manajemen waktu pelaksanaan pembangunan.

Temuan ini konsisten dengan Hadita & Rashid, (2024) menemukan bahwa partisipasi tenaga dalam pembangunan desa—yang banyak ditopang oleh budaya gotong royong—memang menjadi kekuatan sosial utama, namun kontribusi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan formal, sehingga peran masyarakat lebih dominan pada tahap pelaksanaan dibandingkan pada tahapan perumusan kebijakan dan perencanaan pengembangan desa. Di Takatunga, gotong royong tampak sebagai modal sosial yang kuat, namun belum sepenuhnya dikelola sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan desa yang berbasis partisipasi.

### **3. Partisipasi Pikiran: Ide, Usul, dan Keterlibatan dalam Musyawarah**

Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide tampak lebih lemah dibanding partisipasi tenaga. Warga cenderung hadir secara fisik dalam musyawarah desa, tetapi tidak semua berani atau terbiasa menyampaikan pendapat. Kepala Desa Bapak Nikolaus Nago menyatakan: *“Dalam pelaksanaan forum pertemuan, partisipasi masyarakat memang terlihat dari jumlah yang hadir, tetapi banyak warga belum berani menyampaikan ide dalam perencanaan karena kurang percaya diri dan merasa pendapat harus berasal dari orang yang lebih paham, atau berkompeten”*. Aparat Desa Ibu Agnes Bupu menambahkan bahwa pemerintah desa telah berupaya memberikan kesempatan kepada semua peserta, namun banyak ide justru disampaikan secara informal setelah rapat selesai.

Ibu Martina Watu menggambarkan situasi ini dengan jelas ketika mengatakan bahwa saat forum resmi berlangsung, banyak warga yang memilih diam dan baru menyampaikan perasaan setuju atau tidak setuju di luar forum, misalnya di rumah atau di kebun. Fenomena ini mengindikasikan adanya hambatan psikologis dalam partisipasi deliberatif, antara lain karena norma budaya menghargai otoritas pemimpin desa,

rendahnya kepercayaan diri, serta keterbatasan pemahaman teknis tentang perencanaan pembangunan.

Dari perspektif teori partisipasi Arnstein, warga Desa Takatunga masih berada pada tingkat konsultasi dan tokenism, di mana masyarakat diundang untuk hadir dan didengar, tetapi tidak selalu memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan akhir. Keadaan ini juga sejalan dengan temuan Putra, (2023) menunjukkan bahwa di banyak desa, partisipasi warga dalam forum musyawarah masih bersifat pasif dan berada pada tingkat tokenism, karena proses pengambilan keputusan tetap sangat didominasi oleh elite desa; sehingga aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum belum memiliki jaminan untuk diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Penelitian ini memperkuat gambaran tersebut dengan menunjukkan bahwa di Takatunga pun, partisipasi pikiran belum berkembang menjadi partisipasi yang substantif dan setara.

### **Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat**

Hasil wawancara dan analisis data menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Kepala Desa Takatunga Bapak Nikolaus Nago menyebutkan bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya informasi yang merata: *“Kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan masih rendah karena mereka menganggap pembangunan sebagai tanggung jawab pemerintah. Hambatan lain muncul dari kesibukan warga di ladang serta kurangnya informasi dan sosialisasi, sehingga sebagian tidak mengetahui waktu maupun cara berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.”* Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi pemerintah desa belum sepenuhnya inklusif.

Selain itu, faktor ekonomi menjadi penghambat signifikan. Bapak Gregorius Gosa menyatakan bahwa *“kendala terbesar adalah masalah ekonomi. Banyak yang lebih memilih bekerja harian demi memenuhi kebutuhan keluarga, daripada ikut gotong royong tanpa ada kepastian hasil atau insentif.”* Pernyataan ini menggambarkan ketegangan antara ideal gotong royong dan realitas kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung memprioritaskan pekerjaan yang langsung menghasilkan, sehingga ruang untuk partisipasi voluntir menjadi terbatas.

Faktor psikologis dan sosial juga berperan. Ibu Lusia Ninu menyebut bahwa beberapa warga *“masih kurang percaya diri karena merasa pendapatnya tidak penting atau takut dikritik.”* Hal ini berkaitan dengan budaya hierarkis di desa, di mana keputusan sering kali dipersepsikan sebagai domain elite desa. Kurangnya kepercayaan diri ini menghambat partisipasi pikiran yang sebenarnya sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Kuswanto & Anderson, (2023) menegaskan bahwa rendahnya pendidikan, tekanan ekonomi, dan lemahnya fasilitasi dari pemerintah desa menjadi faktor utama yang membatasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena faktor-faktor internal seperti status sosial-ekonomi dan budaya justru lebih dominan memengaruhi keterlibatan warga dibandingkan dukungan eksternal seperti kepemimpinan kepala desa, layanan publik, maupun peran media massa. Di Desa Takatunga, kombinasi ketiga faktor tersebut—informasi yang terbatas, tekanan ekonomi, dan hambatan psikologis—menciptakan kondisi di mana partisipasi masyarakat lebih bersifat sporadis dan bergantung pada momentum, bukan partisipasi yang melembaga.

### **Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat**

Di tengah berbagai kendala tersebut, penelitian juga menemukan sejumlah faktor pendorong yang memperkuat partisipasi. Kepala Desa Takatunga Bapak Nikolaus Nago menjelaskan bahwa *“salah satu pendorong utama adalah kesadaran masyarakat akan manfaat langsung dari pembangunan, seperti jalan tani yang mempermudah membawa hasil panen, atau sanitasi air yang membuat air lebih bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika mereka merasakan manfaatnya, mereka lebih semangat terlibat.”* Pernyataan ini menegaskan bahwa persepsi manfaat konkret menjadi motivator penting bagi warga.

Nilai gotong royong dan kebersamaan juga menjadi pendorong yang signifikan. Ibu Stevania Rauneto menyatakan bahwa ketika sudah ada kesepakatan bersama untuk melakukan kerja bakti, maka banyak warga yang hadir, dan beberapa keluarga bahkan menyiapkan konsumsi. Warga lain menyebut bahwa rasa saling membantu dan keinginan untuk menjaga nama baik kampung mendorong mereka ikut serta dalam pembangunan. Hal ini mencerminkan keberadaan modal sosial yang kuat di tingkat komunitas, bahwa kepercayaan, norma, dan jejaring sosial dapat meningkatkan kapasitas kolektif masyarakat untuk bertindak bersama.

Faktor pendorong lain adalah keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Seorang warga mengatakan bahwa jika tokoh adat sudah mengingatkan atau mengajak, maka warga akan berusaha datang karena menganggap ajakan tersebut sebagai kewajiban moral. Dengan demikian, otoritas tradisional berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan warga, meningkatkan legitimasi program pembangunan dan memobilisasi partisipasi.

Penelitian sebelumnya oleh (Hussain et al., 2022) menunjukkan bahwa ketika pembangunan infrastruktur dipersepsikan relevan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan didukung oleh komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan, tingkat partisipasi warga dalam proses pembangunan cenderung meningkat. Temuan di Takatunga memperkuat kesimpulan tersebut dengan menunjukkan secara konkret bagaimana manfaat langsung dan peran tokoh lokal mempengaruhi partisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

### **Keterkaitan Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Keuangan Desa**

Desa Takatunga memiliki potensi besar berupa jaringan sosial yang kuat, budaya gotong royong, dan kepercayaan pada tokoh lokal. Namun, modal sosial tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bentuk partisipasi struktural dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur masih didominasi oleh pemerintah desa dan perangkatnya. Warga lebih banyak terlibat pada tahap pelaksanaan, terutama sebagai tenaga kerja gotong royong, daripada pada tahap perencanaan dan evaluasi. Potensi ini perlu dikembangkan menjadi kerangka kelembagaan, misalnya melalui forum musyawarah yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas warga dalam membaca dokumen anggaran, serta mekanisme umpan balik yang sistematis

Prinsip *good governance* yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik pembangunan di Desa Takatunga. Partisipasi masyarakat masih didominasi dimensi pelaksanaan, transparansi informasi belum merata, dan mekanisme akuntabilitas sosial masih terbatas. Namun, temuan positif berupa adanya kesadaran manfaat pembangunan dan praktik gotong royong memberikan landasan yang kuat untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang lebih partisipatif.

Literatur mengenai penguatan pengelolaan keuangan desa menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi merupakan syarat

penting bagi akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Nikijuluw et al. (2022) menekankan bahwa tanpa partisipasi masyarakat yang bermakna dan pengawasan publik yang efektif, pengelolaan keuangan desa berisiko menjadi sekadar prosedural serta membuka ruang bagi manipulasi hingga tindak korupsi oleh aparat desa. Susanti et al., (2025) menekankan bahwa tanpa partisipasi masyarakat yang benar-benar bermakna, tata kelola keuangan desa berisiko menjadi sekadar prosedural dan tidak mampu memastikan akuntabilitas substantif. Temuan di Desa Takatunga turut menguatkan hal tersebut, di mana meskipun Dana Desa telah dialokasikan untuk kebutuhan prioritas seperti pembangunan jalan tani dan sanitasi air, mekanisme partisipatif yang mengiringinya masih terbatas dan belum sepenuhnya melibatkan warga dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.

Dalam kerangka teori Arnstein, posisi partisipasi masyarakat Takatunga berada pada tingkatan konsultasi dan kadang hanya sekadar informatif, belum mencapai tingkat kemitraan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, dari perspektif modal sosial Putnam, gotong royong dan kepercayaan lokal sudah terbentuk tetapi masih perlu dikaitkan secara struktural dengan mekanisme tata kelola keuangan desa yang transparan dan inklusif.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Takatunga dalam pembangunan infrastruktur terutama terwujud dalam bentuk kontribusi tenaga dan keterlibatan langsung pada tahap pelaksanaan, sementara partisipasi pada tahap perencanaan dan evaluasi masih terbatas. Masyarakat cenderung hadir ketika diajak, namun belum berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga partisipasi yang muncul lebih bersifat responsif daripada deliberatif. Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa modal sosial seperti gotong royong, solidaritas komunitas, dan kepercayaan pada tokoh lokal telah menjadi pendorong utama partisipasi, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan tata kelola keuangan desa. Siklus perencanaan dan penganggaran Dana Desa masih didominasi oleh pemerintah desa, sehingga partisipasi masyarakat belum menjadi elemen struktural dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme partisipatif melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami dokumen anggaran, memperluas akses informasi publik, serta memperkuat ruang deliberasi dalam musyawarah desa. Dari sisi teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai partisipasi masyarakat dan pengelolaan keuangan desa dengan memperlihatkan bagaimana modal sosial kuat tidak otomatis menghasilkan partisipasi substantif tanpa dukungan kelembagaan yang inklusif. Penelitian mendatang perlu mempertimbangkan analisis lebih mendalam mengenai kapasitas literasi fiskal masyarakat desa serta pengaruh kepemimpinan lokal terhadap dinamika partisipasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anisa, B. M. N., Noor, I., & Nugroho, G. W. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal*, 3(3), 1665–1687. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.327>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi 5). UPP STIM YKPN.
- Asdi, Tawil, N. S. K. M. R., Zen, A., & Hendayani, N. (2023). Fund financial management strategy effort to improve accountability and sustainability of village government leadership. *Enrichment: Journal of Management*, 13(3), 154–165.

[www.enrichment.iocspublisher.org](http://www.enrichment.iocspublisher.org)

- Fujiyanti, Sawitri, D., & Mulyono, S. (2023). A Multisite Study on the Governance of Rural Labor-Intensive Programs Post Pandemic Covid -19. *International Journal of Social Science And Human Research*, 06(12), 7494–7499. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i12-37>
- Hadita, A., & Rashid, S. (2024). Clinic Strengthening Society Participation on Planning the Development of a Religious Tourism Village Through Transparency , Accountability , Communication and Leadership. *Journal of Nonformal Education*, 10(2), 239–250. <https://journal.unnes.ac.id/journals/jone>
- Hasanati, S., Rijanta, R., & Pitoyo, A. J. (2023). Rural planning study based on RPJMDes in Jepitu Village, Gunung Kidul Regency, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, ICOAGPG-2022, 1–7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1190/1/012034>
- Hussain, S., Maqbool, R., Hussain, A., & Ashfaq, S. (2022). Assessing the Socio-Economic Impacts of Rural Infrastructure. *Buildings*, 12(947), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/buildings1207094>
- Ikhyanuddin, Haykal, M., & Murhaban. (2025). *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah : Inovasi dan Tata Kelola Penyusunan APBD*. Penerbit Takaza Innovatix Labs.
- Irawan, A. (2023). The Influence of Village Fund Allocation Policies on Infrastructure Development in Villages. *Journal of Governance*, 8(4), 619–627. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v8i4.23016>
- Kuswanto, & Anderson, I. (2023). Structural Model of Community Participation in Rural Development in Jambi Province , Indonesia. *Population and Economics*, 7(2), 115–141. <https://doi.org/10.3897/popecon.7.e97189>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data Analysis: A Methods Sourcebook* (Edition 3). SAGE Publications.
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2024). Demystification and Actualisation of Data Saturation in Qualitative Research Through Thematic Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 23, 1–17. <https://doi.org/10.1177/16094069241229777>
- Ompusunggu, V. M., & Munthe, R. G. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Pada Kecamatan Merek , Kabupaten Karo , Sumatera Utara Implementation of Village Fund Allocation Policy ( ADD ) Against Increasing Village Development in Merek District. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 20(2), 162–169. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.5491>
- Putra, F. (2023). Village Governance and Public Participation in Indonesia. *JISCOS Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 03(2), 55–64. <https://journal.unnes.ac.id/journals/jone>
- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BLERONG. *SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 22(2), 187–196.
- Rahmasari, B. (2020). Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Volksgeist*, 3(2), 117–132. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4001>
- Ramandey, L., & Binur, R. E. (2020). Public Participation in the Village Infrastructure Development Process Case Study : Program PNPM Mandiri Perdesaan in the Village Ambora Jayapura. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*

- (IJPSAT), 22(2), 232–234. <http://ijpsat.ijsht-journals.org>
- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798–1811. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.819> Analisis
- Susanti, D., Sujianto, Tua, H., As'ari, H., & Yulia, D. (2025). Impacts of community participation , multi-actor collaboration , transparency , and accountability on village financial governance in Rokan Hulu , Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 234–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.15900>
- Tamsil, Yunus, R., & Mariati. (2025). MANAJEMEN KEUANGAN DESA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT: STRATEGI TATA KELOLA KEUANGAN YANG BERKELANJUTAN. *Journal Publicuho*, 8(1), 581–590. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.690>
- Taurista, H., & Choiriyah, I. U. (2024). Community Participation in Development Planning is Driven by Leadership, Communication, and Education. *Community Education Development Articles*, 15(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1080>